

KILAS

Pepera 1969 Kembali Digugat

SENTANI — Ratusan warga Papua menggelar mimbar bebas menuntun Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 dikaji ulang kemarin. Mereka yang memenuhi halaman dan jalan di sekitar makam bekas Ketua Dewan Papua Theys Eluay di Sentani, Jayapura.

Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yoboisebut mengatakan, warga akan mengembalikannya hasil Pepera secara simbolis kepada pemerintah dan menuntun dilaksanakannya referendum bagi Papua. "Kami mau supaya Pepera dikaji kembali oleh Penserikatan Bangsa-Bangsa karena pelaksanaannya pada 1969 tidak sah. Kami ingin kedaulatan yang murni," kata Foskorus. ● TJAHJONO EP

Sepuluh Truk Kayu Ditangkap di Papua

JAYAPURA — Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua menangkap 10 truk bermuatan kayu jenis kayu besi atau merbau yang diduga ilegal kemarin. Truk-truk yang beriringan dari Hutan Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, ke Kota Jayapura itu memiliki keterangan dalam surat izin kepemilikan kayu yang berbeda dengan jenis dan ukuran kayu yang diangkutnya. "Ada dugaan kayu ini akan di ekspor ke luar negeri," kata Ketua Tim Operasi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua Alamsiah kemarin.

Alamsiah menduga aparat keamanan terlibat dalam penyelundupan kayu itu. "Sebab, sejak lokasi pengambilannya hingga Sentani, banyak melewati pos-pos pemeriksaan, namun semuanya lolos," katanya. ● GUNDIRING LEVI

Harta Calon Wakil Wali Kota Samarinda Rp 224 Miliar

SAMARINDA — H M. Damanhuri tercatat sebagai yang terkaya di antara calon kepala daerah yang sedang bersaing di Samarinda, Kalimantan Timur. Calon wakil wali kota asal Partai Golkar itu memiliki harta senilai Rp 224,8 miliar.

Berdasarkan data yang dirilis KPUD Samarinda kemarin, urutan kedua terkaya adalah calon wali kota dari PDI Perjuangan, Ipong Muchlisoni, dengan kekayaan Rp 20,8 miliar dikurangi utang senilai lebih dari Rp 4 miliar. Harta kandidat *incumbent*, Syaharie Jaeng, Wakil Wali Kota Samarinda, justru tercatat paling sedikit, yakni Rp 2,3 miliar plus US\$ 13.278. ● FIRMAN HIDAYAT

PILKADA ULANG SURABAYA

Pelanggaran Terulang

"Mau gugat ke mana lagi? Ke malaikat?"

SURABAYA — Pelanggaran masih terjadi dalam ulangan pemilihan wali kota Surabaya, Minggu lalu. "Seperti pemilihan 2 Juni lalu, masih ada pelanggaran yang terjadi," kata Wahyu Hariadi, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Surabaya, kemarin.

Pelanggaran di antaranya berupa undangan (formulir C-6) yang tidak terdistribusi ke warga yang sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap. Kasus ini terjadi pada banyak warga pemilih di Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, dan Kelurahan Putat Jaya. "Kami akan menindaklanjuti dan mengklarifikasi hal ini ke kelompok panitia pemungutan suara," kata Wahyu.

Pelanggaran juga terjadi di bagian lain kota itu, lokasi di mana hak pilih warga pemegang formulir C-6 ditolak. Ada pula yang sudah memegang formulir C-6 namun tidak tercatat dalam DPT. "Termasuk ada satu saksi yang bisa mengawasi 80 TPS hanya dengan satu surat mandat," kata Suparno, anggota panitia pengawas.

Menurut Suparno, pelanggaran-pelanggaran itu masih terjadi karena KPU setempat tidak maksimal mempersiapkan dan membekali panitia pemungutan suara dengan berbagai aturan yang berlaku. "Seharusnya pelanggaran tak perlu terjadi lagi," kata dia.

Edward Dewaruci, anggota KPU Surabaya, secara terpisah menyatakan telah bekerja maksimal di antara minimnya waktu persiapan untuk pencoblosan ulang sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. "Kalau ada kecurangan itu, silakan Panwas menindaklanjutinya," kata Edward.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono meminta kandidat yang kalah dalam coblos ulang kali ini bisa menerima kekalahan. Bambang kembali mencalonkan diri, tapi kali ini sebagai wakil dari Tri Rismaharini, bekas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya, yang maju mencalonkan diri sebagai wali kota periode 2010-2015.

"Mau gugat ke mana lagi? Ke malaikat?" kata Bambang sambil tertawa.

Keduanya, yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,

kembali bersaing ketat dengan jago Partai Golkar dan Demokrat, yakni pasangan Arif Afandi-Adies Kadir kemarin. Pasangan yang kedua inilah yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan meminta pencoblosan ulang di lima kecamatan serta dua kelurahan, karena merasa perolehan suara dukungan untuk mereka dicurangi.

Bambang mengaku tidak khawatir dengan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan ulang yang terhitung sangat rendah (angka golput tinggi). Bambang mengatakan, partisipasi tidak dilihat dari seberapa banyak jumlah orang yang mencoblos.

"Partisipasi bisa dilihat dari berbagai ukuran," kata dia sambil menunjuk aksi unjuk rasa, menulis kritik, menulis surat pembaca, atau menulis opini. "Tidak masalah jumlah yang *nyoblos* sedikit asalkan masyarakat masih berpartisipasi dalam berbagai hal."

Anggota tim kemenangan pasangan Arif-Adies, Yuniarto Wahyudi, mengatakan timnya belum menentukan sikap atas hasil pemungutan dan penghitungan ulang nanti. "Rekapitulasi oleh KPU Surabaya kan belum ada," ujarnya. ● DINI MAWUNTYAS



ARIEF PRYONO (ANTARA)

Korban Suporter

Perawat mengecek kondisi korban lemparan batu, Trimaryono, 32 tahun yang dirawat di Instalasi Gawat Darurat RSD Gembira, Kediri, Jawa Timur, kemarin. Dua orang terluka di bagian kepala akibat aksi saling lempar batu antara suporter Persikmania dan Aremania yang ketubuhan melintas di wilayah Kediri dengan menumpang kereta api.

DPR Datangi Polisi Jambi

JAMBI — DPR meminta Kepolisian Daerah Jambi segera menarik garis dan menutup pabrik pengolahan buah sawit milik PT Deli Muda Perkasa. Pabrik yang berlokasi di Desa Sengkatibaru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, tersebut dituding tidak mengantongi izin operasional sehingga merugikan negara Rp 160 miliar lewat kewajiban pajak yang tidak disetorkan.

"Kami sangat kecewa sudah empat tahun perusahaan ini beroperasi tanpa izin, tapi tidak dilakukan penindakan," kata Trimedya Panjaitan, anggota Komisi Hukum DPR, saat bertandang ke Markas Polda Jambi kemarin.

Sebanyak delapan anggota DPR, dipimpin Wakil Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsudin, melakukan kunjungan sehari ke Jambi. Mereka datang khusus untuk mempertanyakan kasus PT DMP dan pengusutannya yang terkesan lamban.

Selain menemui polisi, mereka melakukan pertemuan dengan jajaran aparat Kejaksaan Tinggi Jambi. "Kami sangat kecewa dengan cara penegakan hukum seperti ini," kata Ahmad Yani, anggota lainnya.

Kepala Polda Jambi Brigadir Jenderal R. Dadang Garhadi berjanji akan memenuhi tenggat 18 Agustus untuk menuntaskan kasus ini, seperti yang diminta para anggota DPR tersebut. "Tidak hanya masalah izin operasional, tapi juga dugaan pengemplangan pajak dan dampaknya terhadap lingkungan," kata Dadang.

Dadang mengungkapkan, sebanyak tiga tersangka sudah ditetapkan, yakni Direktur Utama PT DMP Jufendiwan, pemilik perusahaan Surya Darmadi, serta manajer pabrik, Bijak Perangin-Angin. Satu berkas atas nama Bijak Perangin-Angin bahkan sudah dilimpahkan ke penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi.

"Kami bersungguh-sungguh, buktinya kami telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Yuswa Kusumah Afandi Basri.

Hotma Sitompoe, kuasa hukum Surya Darmadi dan PT DMP, yang dihubungi terpisah, mempertanyakan langkah DPR datang ke Jambi kemarin. "Ada apa ini?" kata dia sambil menambahkan, "Tidak ada intervensi dari siapa pun dalam kasus ini, kecuali dari DPR."

● WURAGI/ SYAIPUL BAKHORI (JAMBI)

Nama Sama, Nyawa Bupati Hampir Melayang

Beruntung Bupati Bone Bolango di Gorontalo, Ismet Mile, sedang tidak ada di rumah dinasnya di Desa Toto Utara, Kecamatan Kabila, Ahad lalu. Kalau saja dia ada di tempat, nasibnya bisa saja berakhir nahas.

Seorang warga, Ismet Danial, nekat menerobos rumahnya dan mencarinya sambil menggemang sebilah golok pada hari itu. Dia yang berusaha mencongkel pintu depan membuat pembantu sang bupati berteriak-teriak ketakutan sehingga menarik perhatian ang-

gota polisi yang kemudian meringkus Ismet.

Belakangan diketahui bahwa Ismet rela berjalan sejauh 4 kilometer dari desanya, Tanggilingo, mencari Ismet Mile, si bupati, karena tidak terima memiliki kesamaan nama depan. "Soalnya nama bupati sama dengan nama saya, Ismet, dan menjadi bupati itu tidak baik," kata Ismet si calon pembunuh ketika ditemui di selnya di Kepolisian Sektor Kabila kemarin.

Di ruang tahanannya itu, Ismet

tampak murung. Pemuda 23 tahun, berpostur kurus dan pendek, itu juga beberapa kali menjawab ngawur pertanyaan yang diajukan *Tempo*. "Karena Golkar dan saya pakai gigi palsu," katanya satu kali.

Kepala Polsek Kabila Ajun Komisararis Yudo Huntoro mengatakan, pihaknya akan mentransfer Ismet ke Rumah Sakit Jiwa jika memang yang bersangkutan ternyata memiliki kelainan jiwa. "Tapi kalau terbukti tidak gila, maka dikenai pasal 335 tentang ancaman pembunuhan dengan ancaman

hukuman satu tahun penjara," kata Yudo.

Anggota keluarga yang datang ternyata mengabarkan bahwa Ismet mengidap malaria. Mereka meminta maaf dan menjelaskan penyakit itu sudah bersemayam dalam tubuhnya selama dua tahun.

Penyakit itu pula yang pernah mendorong Ismet melaporkan bahwa keluarganya telah dibantai. "Tapi ketika anggota saya turun ke lokasi, ternyata tidak benar," Yudo mengungkapkan.

● CHRISTOPEL PAINO